



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, September 2021
Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. R DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang berisikan Program dan Kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan Keuangan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022, tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Pekalongan yang mengusung visi Kota Pekalongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta Badan Keuangan Daerah dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Pekalongan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan maupun Perubahan Kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Disamping itu, RENJA yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti

- Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
 26. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekoangan 2021-2026. Serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2022.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah

Kota Pekalongan dengan pembandingan Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;

4. Pedoman dalam menyusun dokumen rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2022;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasa tiap bab dalam Renja PD.

BAB 2 HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisikan tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah,, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisikan tentang Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, berisikan rencana kerja kegiatan, capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD dan pagu program dan kegiatan.

BAB 5 PENUTUP, berisikan uraian penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKD Kota Pekalongan

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel dibawah di ini

Tabel 2.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2020

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | % | 850 | 455 | 53,53% |
| 2 | Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD | % | 82,50 | 81,12 | 98,33% |
| 3 | Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas | % | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Persentase peningkatan PAD | % | 10 | 151,22 | 1512,20% |

Capaian kinerja pada indikator nilai keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja 53,53%. Capaian pada indikator ini tidak melebihi/melampaui target yang ditetapkan. Dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

- Telah tersedia media akses Informasi Publik berupa laman website: <https://bakeuda.pekalongankota.go.id/> yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Kota Pekalongan, yang dikelola oleh admin Dinkominfo dan admin BKD
- Dengan disediakannya media akses informasi publik dan media sosial juga dapat mendorong transparansi badan publik guna mewujudkan pertanggungjawaban publik oleh BKD Kota Pekalongan, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap kinerja BKD Kota Pekalongan

Faktor penghambat :

- Belum adanya sumber daya aparatur yang kompeten secara khusus bertugas sebagai admin website BKD dan media sosial, sehingga isi media akses informasi publik tersebut tidak update secara berkala
- Bidang belum secara periodik melaporkan kegiatan sebagai bahan untuk updating pada web yang tersedia

Pada sasaran yang kedua dengan dengan 3 indikator capaiananya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi LKjIP (AKIP) dengan capaian kinerja 98,33%. Capaian pada indikator ini belum melebihi/melampaui target yang ditunjukkan.
- Capaian kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas dengan capaian kinerja 100%. Capaian pada indikator ini sesuai dengan target yang ditunjukkan.
- Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 1512,20%.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

- Komitmen dari semua elemen dari kepala kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
- Adanya Reward dan punishment yang tegas
- Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

- dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali
- Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah
 - Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran
 - Pemasang alat perekam transaksi para wajib data (tapping box)
 - Telah dilakukannya pemutahiran data PBB secara bertahap disemua kecamatan.
 - Kemudahan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan peningkatan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point dan kantor kas
 - Dilakukannya pemeriksaan Pajak Daerah
 - Makin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak
 - Makin optimalnya kegiatan Verifikasi BPHTB

Faktor penghambat :

- Penyusunan LKD tidak tepat waktu
- Kualitas laporan belum sesuai standart
- SIMKEU belum memadai
- Server SIMBADA down
- SDM kurang mencukupi dan kurang kompeten
- Data Laporan Neraca Aset Tetap yang terlambat dikirim oleh OPD
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Belum optimalnya potensi PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
- Perda-perda atau Perwal yang belum menyesuaikan dengan perubahan perundangan dan kondisi terkini
- SOP yang perlu dievaluasi
- Masih perlunya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
- Rendahnya capaian realisasi pendapatan BLUD RSUD
- Berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali
- Pemanfaatan asset pemerintah yang belum optimal

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel 2.1.2 dibawah ini

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
BKD Kota Pekalongan

| No. | Indikator Urusan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018) | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Renstra sd 2020 | Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 |
|------------------------|---|----------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target Perubahan Renja 2020 | Realisasi Tahun 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Urusan Keuangan | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan potensi pendapatan | Persen | 4,5 | - | 4,9 | 4 | 22,73 | 22,73 | 505,15 | Tercapai |
| | - Jumlah WP/ WR yang dilayani | WP/WR | 2500 | 49 | 4500 | 18.000 | 19.485 | 19.485 | 108,25 | Tercapai |
| | - Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD) | surat | 9000 | 91121 | 19026 lembar | 9.000 | 9.387 | 9.387 | 104,30 | Tercapai |
| | - Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun | Buku | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun | Buku | 0 | - | 53 | 94 | 93 | 93 | 98,94 | Belum Tercapai |
| | - Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan | berkas | 2000 | 2762 | 2570 | 2.000 | 2.963 | 2.963 | 148,15 | Tercapai |
| | - Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan | kali | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan | Aplikasi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan | Aplikasi | 4 | - | 6 | 5 | 14 | 14 | 280,00 | Tercapai |
| | - Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan | Lembar | 92000 | 86500 | 90793 | 90.000 | 95.680 | 95.680 | 106,31 | Tercapai |
| | - Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata | Objek | 2000 | 2523 | 2500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun | Buku | 10 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| 2 | persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot | Persen | 64,5 | - | 62,07 | 63 | 37,82 | 37,82 | 58,63 | Belum Tercapai |
| 3 | Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |

| No. | Indikator Urusan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018) | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Renstra sd 2020 | Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 |
|-----|--|------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target Perubahan Renja 2020 | Realisasi Tahun 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun | buku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun | buku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala | unit | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Sertifikat yang diajukan | bidang | 32 | 139 | 30 | 282 | 282 | 282 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Patok batas tanah yang diadakan | patok | 55 | 600 | 55 | 600 | 600 | 600 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan | kali | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 500,00 | Tercapai |
| | - Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan | OPD | 35 | 58 | 27 | 30 | 60 | 60 | 200,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan | Unit Kerja | 36 | 72 | 36 | 36 | 72 | 72 | 200,00 | Tercapai |
| | - Jumlah laporan/data pengelolaan BMD | Laporan | 67 | 134 | 67 | 67 | 134 | 134 | 200,00 | Tercapai |
| | - Jumlah jenis BMD yang akan dihapus | jenis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan | unit | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 140,00 | Tercapai |
| | - Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang / berat | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat | unit | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 5 | Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| 6 | Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun | dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |

| No. | Indikator Urusan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018) | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Renstra sd 2020 | Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 |
|----------|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target Perubahan Renja 2020 | Realisasi Tahun 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun | dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun | dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | kali | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah pelaksanaan asistensi RKA | kali | 66 OPD/unit kerja | 67 OPD/unit kerja | 67 OPD/unit kerja | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan | kali | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | Tercapai |
| 7 | Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun | Laporan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | OPD | 67 | 12 bulan | 12 bulan | 67 | 134 | 134 | 200,00 | Tercapai |
| | - Jumlah pendampingan pemanfaatan SIMRAL yang dilaksanakan | kali | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan | PD/Unit Kerja | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun | laporan | 6 | 2 buku | 2 buku | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah publikasi laporan keuangan | kali | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| 8 | Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak | Persen | 100 | - | 108,92 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| 9 | Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi | Persen | 100 | - | 27,71 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah surat tagihan/surat pemberitahuan pembayaran/surat peringatan yang diterbitkan | surat | 25000 | 50 persen | 54,1 persen | 5.100 | 6196 | 6196 | 121,49 | Tercapai |
| | - Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan | kali | 1 | 300 wp/wr | 300 wp/wr | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak | kali | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 | Tercapai |

| No. | Indikator Urusan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018) | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Renstra sd 2020 | Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 |
|---------------------|--|---------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target Perubahan Renja 2020 | Realisasi Tahun 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi | berkas | 1500 | 1986 | 1870 | 1.500 | 1887 | 1887 | 125,80 | Tercapai |
| | - Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa | OP/WP | 12 | 50 | 22 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | Tercapai |
| 10 | Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| 11 | Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun | sisdur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah laporan kerugian daerah yang disusun | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK | kali | 12 | 6 bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun | laporan | 2 | 4 triwulan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | kali | 300 orang | 300 orang | 287 orang | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan | data | 3200 | 3200 | 3223 | 3.200 | 3299 | 3299 | 103,09 | Tercapai |
| | - Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan | kali | 13 | 12 | 3100 orang | 13 | 13 | 13 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak | PD/Unit Kerja | 66 | 67 | 67 | 67 | 268 | 268 | 400,00 | Tercapai |
| | - Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai | kali | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | Tercapai |
| Usuran Rutin | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - jumlah bulan penyediaan jasa administrasi | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |

| No. | Indikator Urusan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018) | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Renstra sd 2020 | Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 |
|-----|--|------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target Perubahan Renja 2020 | Realisasi Tahun 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | keuangan | | | | | | | | | |
| | - Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | bulan | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah | orang/kali | 550 | 498 | 819 | 200 | 453 | 453 | 226,50 | Tercapai |
| 2 | Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | unit | 30 | 49 | 53 | 58 | 42 | 42 | 72,41 | Belum Tercapai |
| | - Jumlah gedung kantor yang ter rehabilitasi sedang/berat | unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | unit | 19 | 53 | 40 | 61 | 68 | 68 | 111,48 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| 3 | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun | dokumen | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun | laporan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | Tercapai |

| No. | Indikator Urusan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018) | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Renstra sd 2020 | Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 | Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021 |
|-----|--|-------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target Perubahan Renja 2020 | Realisasi Tahun 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan Laporan Keuangan SKPD yang disusun | dokumen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah | bulan | 12 | - | 0 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun | dokumen | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | Tercapai |
| 4 | Pengaduan yang diterima | kasus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Tercapai |
| | - Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota | orang/bulan | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | Tercapai |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP, Penetapan Peraturan APBD yang tepat waktu dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|----------------------|--------|----------|------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | | | 800 | 850 | 900 | - | 650 | 455 | 900 | - | |
| 2 | Nilai LKjIP (AKIP) | | | 80 | 82,5 | 85 | - | 80,33 | 81,12 | 85 | - | |
| 3 | Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas | | | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | |
| 4 | Persentase Peningkatan PAD | | | 10 | 10 | 10 | - | 39,94 | 151,22 | 10 | - | |

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Pekalongan

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|--------------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| A | Indikator Program :Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) | | | n/a | 11,91 Persen | 8,33 Persen | 8,08 Persen | 11,91 persen | 11,91 persen | 8,33 Persen | 8,08 Persen | |
| I | Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 1 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun | | | 0 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 2 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun | | | 0 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 3 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | |
| 4 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 5 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |
| 6 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | |
| 7 | Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |
| 9 | Indikator Sub Kegiatan : Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | |
| 10 | Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 11 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 13 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan | | | 6 kali | 16 kali | 16 kali | 16 kali | 6 kali | 6 kali | 16 kali | 16 kali | |
| II | Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 14 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah | | | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | |
| 15 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan | | | 67 OPD | 67 OPD | 67 OPD | 67 OPD | 67 OPD | 67 OPD | 67 OPD | 67 OPD | |
| 16 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | |
| 17 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun | | | 2 laporan | 30 laporan | 30 laporan | 30 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 30 laporan | 30 laporan | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai | | | 4 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 4 kali | 4 kali | 2 kali | 2 kali | |
| 19 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan | | | 3200 data SPT tahunan | 3120 data SPT tahunan | 3120 data SPT tahunan | 3120 data SPT tahunan | 3229 data SPT tahunan | 3229 data SPT tahunan | 3120 data SPT tahunan | 3120 data SPT tahunan | |
| 20 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan | | | 13 kali | 14 kali | 14 kali | 14 kali | 13 kali | 13 kali | 14 kali | 14 kali | |
| 21 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 22 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | | | 1 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 1 kali | 1 kali | 3 kali | 3 kali | |
| III | Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 23 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD | | | 67 PD/Unit kerja | 68 laporan | 68 laporan | 68 laporan | 67 PD/Unit kerja | 67 PD/Unit kerja | 68 laporan | 68 laporan | |
| 24 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | | | 7 laporan | 0 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | |
| 25 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun | | | 14 laporan | 13 laporan | 13 laporan | 13 laporan | 14 laporan | 14 laporan | 13 laporan | 13 laporan | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | | | | 68 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 0 laporan | |
| 27 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | | | | 7 PD/ unit kerja | 0 PD/ unit kerja | 0 PD/ unit kerja | 0 PD/ unit kerja | 0 PD/ unit kerja | 0 PD/ unit kerja | 0 PD/ unit kerja | |
| 28 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan | | | | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | |
| 29 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun | | | | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | |
| 30 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 31 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |
| 32 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun | | | | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | |
| 33 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 34 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan | | | | 0 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 0 kali | 0 kali | 4 kali | 4 kali |
| 35 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun | | | | 0 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 0 laporan | 0 laporan | 4 laporan | 4 laporan |
| 36 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan | | | | 0 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 0 kali | 0 kali | 12 kali | 12 kali |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| IV | Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 37 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan dana BTT | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| B | Indikator Program :Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| I | Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 38 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku standar harga yang disusun | | | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | |
| 39 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah | | | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | |
| 40 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah papan nama aset | | | 0 buah | 55 buah | 55 buah | 55 buah | 0 buah | 0 buah | 55 buah | 55 buah | |
| 41 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah patok batas tanah | | | 600 patok | 600 patok | 600 patok | 600 patok | 600 patok | 600 patok | 600 patok | 600 patok | |
| 42 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengajuan sertifikat | | | 282 bidang | 800 bidang | 800 bidang | 78 bidang | 282 bidang | 282 bidang | 800 bidang | 78 bidang | |
| 43 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD | | | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | |
| 44 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat | | | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala | | | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | |
| 46 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat | | | 0 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 0 unit | 0 unit | 3 unit | 3 unit | |
| 47 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok | | | 1 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali | 5 kali | |
| 48 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan | | | 67 laporan | 65 laporan | 80 laporan | 80 laporan | 67 laporan | 67 laporan | 80 laporan | 80 laporan | |
| 49 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan | | | 30 OPD | 30 OPD | 0 OPD | 0 OPD | 30 OPD | 30 OPD | 0 OPD | 0 OPD | |
| 50 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan | | | 36 unit kerja | 35 unit kerja | 0 unit kerja | 0 unit kerja | 36 unit kerja | 36 unit kerja | 0 unit kerja | 0 unit kerja | |
| C | Indikator Program :Deviiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) | | | 5 Persen | 0,05 Persen | 0,05 Persen | 0,05 Persen | 32,88 Persen | 32,88 Persen | 0,05 Persen | 0,05 Persen | |
| I | Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD | | | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 118,05 Persen | 118,05 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 51 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |
| 52 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun | | | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | |
| 54 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan | | | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | |
| 55 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 3 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 3 kali | |
| 56 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan senam sehat PBB yang dilaksanakan | | | 0 kali | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 0 kali | 0 kali | 0 kali | 1 kali | |
| 67 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah surat tagihan yang diterbitkan | | | 5100 surat | 3060 surat | 3060 surat | 3060 surat | 6196 surat | 6196 surat | 3060 surat | 3060 surat | |
| 68 | Indikator Sub Kegiatan : Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah | | | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | 8 wajib pajak | |
| 69 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah | | | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | |
| II | Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak | | | 4,00% | 4,5 persen | 4,6 persen | 4,7 persen | 22,73% | 22,73% | 4,6 persen | 4,7 persen | |
| 70 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata | | | 2000 objek | 1500 objek | 1500 objek | 1500 objek | 2000 objek | 2000 objek | 1500 objek | 1500 objek | |
| 71 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring | | | 0 objek | 1140 objek | 1140 objek | 1140 objek | 0 objek | 0 objek | 1140 objek | 1140 objek | |
| 72 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi baru yang diadakan | | | 1 aplikasi | 3 aplikasi | 1 aplikasi | 0 aplikasi | 1 aplikasi | 0 aplikasi | 1 aplikasi | 0 aplikasi | |
| 73 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan | | | 7 aplikasi | 8 aplikasi | 8 aplikasi | 8 aplikasi | 7 aplikasi | 7 aplikasi | 8 aplikasi | 8 aplikasi | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-------------------|---|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 74 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan | | | 2000 berkas | 2000 berkas | 2000 berkas | 2000 berkas | 2963 berkas | 2963 berkas | 2000 berkas | 2000 berkas | |
| 75 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun | | | 94 buku | 94 buku | 94 buku | 94 buku | 93 buku | 93 buku | 94 buku | 94 buku | |
| 76 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021 | | | 1 buku | 4 buku | 4 buku | 4 buku | 1 buku | 1 buku | 4 buku | 4 buku | |
| 77 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate | | | 0 objek | 9300 objek | 8000 objek | 8000 objek | 0 objek | 0 objek | 8000 objek | 8000 objek | |
| 78 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan | | | 90000 lembar | 93000 lembar | 93000 lembar | 93000 lembar | 95680 lembar | 95680 lembar | 93000 lembar | 93000 lembar | |
| 79 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat | | | 9000 lembar | 19000 lembar | 19000 lembar | 19000 lembar | 9387 lembar | 9387 lembar | 19000 lembar | 19000 lembar | |
| 80 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota | | | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | 1 orang/bulan | |
| 81 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani | | | 18000 WP/WR | 14400 WP/WR | 14400 WP/WR | 14400 WP/WR | 18485 WP/WR | 18485 WP/WR | 14400 WP/WR | 14400 WP/WR | |
| 82 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi | | | 1500 WP/WR | 1500 berkas | 1500 berkas | 1500 berkas | 1887 WP/WR | | 1500 berkas | 1500 berkas | |
| Non Urusan | | | | | | | | | | | | |
| D | Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| I | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 83 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja yang disusun | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra yang disusun | | | 0 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | |
| 85 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 86 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | |
| 87 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 88 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 89 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | |
| II | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 90 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 91 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 92 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| D.1 | Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | |
| I | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 93 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 94 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 95 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | | | 19 unit | 27 unit | 15 unit | 15 unit | 68 unit | 68 unit | 15 unit | 15 unit | |
| 96 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 97 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | | | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | |
| 98 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 88 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 100 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah | | | 200 orang/kali | 200 orang/kali | 200 orang/kali | 200 orang/kali | 289 orang/kali | 290 orang/kali | 200 orang/kali | 200 orang/kali | |
| II | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 101 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| 102 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 103 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| D.2 | Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah | | | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | |
| I | Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 0 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0 Persen | |
| II | Indikator Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 104 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan | | | 0 unit | 0 unit | 7 unit | 3 unit | 14 unit | 14 unit | 7 unit | 3 unit | |
| 105 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan | | | 2 unit | 2 unit | 0 unit | 1 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit | |
| 106 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan | | | 0 unit | 0 unit | 60 unit | 20 unit | 0 unit | 0 unit | 60 unit | 20 unit | |
| III | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 107 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | | | 58 unit | 47 unit | 47 unit | 47 unit | 42 unit | 42 unit | 47 unit | 47 unit | |
| 108 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala | | | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah (2020) | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 109 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
| IV | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | |
| 110 | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota | | | 0 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 2 kali | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BKD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan dalam rangka menselaraskan kebutuhan perangkat daerah dengan kemampuan daerah.

Proses penyesuaian antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD menyebabkan adanya perubahan rumusan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.4.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| KEUANGAN | | | | 28,529,000,000 | KEUANGAN | | | | 29.174.400.690 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 18,133,000,000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 Persen | 18.167.373.950 | |
| | | | | | | | Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100 Persen | 21,500,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | 18.150.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen renja yang disusun | 2 dokumen | 5,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja yang disusun | 2 dokumen | 4.700.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra yang disusun | 0 dokumen | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun | 2 dokumen | 3,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun | 2 dokumen | 2.250.000 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | 12 bulan | 13,500,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun | 4 dokumen | 11.200.000 | |
| | | Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun | 4 dokumen | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun | 2 dokumen | | |
| | | Jumlah dokumen SAKIP yang disusun | 2 dokumen | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | 12 bulan | | |
| | | Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun | 5 dokumen | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun | 5 dokumen | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | I | 100 Persen | 14,148,000,000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 Persen | 12.674.941.950 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 12 bulan | 14,000,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan | 12 bulan | 12.537.691.950 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | ASN | | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 bulan | 145,000,000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 bulan | 135.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BKD Kota Pekalongan | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | 1 dokumen | 3,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | 1 dokumen | 2.250.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 100 Persen | 10,000,000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 Persen | 9.500.000 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | BKD Kota Pekalongan | Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota | 2 kali | 10,000,000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota | 2 kali | 9.500.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah | | 1,102,500,000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah | 100 Persen | 908.000.000 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 10,000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 7.500.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | 12 bulan | 435,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | 12 bulan | 395.000.000 | |
| | | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 15 unit | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 15 unit | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | 12 bulan | 25,000,000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | 12 bulan | 18.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | 11 bulan | 140,000,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | 11 bulan | 110.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan | 12 bulan | 60,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan | 12 bulan | 50.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 2,500,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 2.500.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BKD Kota Pekalongan | Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah | 200 orang/kali | 430,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah | 200 orang/kali | 325.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|---|----------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 Persen | 0 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1,703,000,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3.516.000.000 | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan | 7 unit | 1,000,000,000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan | 7 unit | 2.313.000.000 | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan | 60 unit | 703,000,000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan | 0 unit | 1.203.000.000 | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan | 60 unit | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 803,000,000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 716.622.000 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | 3,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | 3.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 575,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 506.400.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor | 12 bulan | 225,000,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor | 12 bulan | 207.222.000 | |
| | | | | | | | Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 345,000,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 324.160.000 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | 47 unit | 150,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | 47 unit | 134.160.000 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BKD Kota Pekalongan | Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala | 1 unit | 150,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala | 1 unit | 150.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 12 bulan | 45,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 12 bulan | 40.000.000 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 6,928,000,000 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | Indikator Program :Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) | 8,33 Persen | 6.687.938.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | 1,085,500,000 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu | 100 Persen | 1.029.216.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun | 1 dokumen | 40,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun | 1 dokumen | 35.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun | 1 dokumen | 40,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun | 1 dokumen | 35.000.000 | |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun | 2 dokumen | 73,000,000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan | 2 kali | 62.000.000 | |
| | | Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan | 2 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA | 2 dokumen | | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|---|----------------|----------------------|---|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | yang disusun | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | BKD Kota Pekalongan | Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan | 2 dokumen | 732,500,000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | 1 kali | 727.908.000 | |
| | | Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun | 4 dokumen | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun | 4 dokumen | | |
| | | Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | 1 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan | 2 dokumen | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BKD Kota Pekalongan | Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | 4 dokumen | 149,500,000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | 1 kali | 143.308.000 | |
| | | Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | 2 dokumen | | | | Indikator Sub Kegiatan : Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | 4 dokumen | | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | 1 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | 2 dokumen | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan | 12 bulan | 28,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan | 12 bulan | 26.000.000 | |
| | | Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan | 16 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan | 16 kali | | |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun | 2 dokumen | 22,500,000 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | BKD Kota Pekalongan | | | 0 | |
| | | Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun | 12 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan | 6 kali | | | | | | | |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 334,500,000 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D | 100 Persen | 266.294.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan | 67 OPD | 92,500,000 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah | 12 kali | 88.444.000 | |
| | | Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan | 3 dokumen | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan | 67 OPD | | |
| | | Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah | 12 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan | 3 dokumen | | |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun | 30 laporan | 30,000,000 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun | 30 laporan | 23.000.000 | |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | BKD Kota Pekalongan | Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai | 2 kali | 35,000,000 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai | 2 kali | 25.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | BKD Kota Pekalongan | Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan | 3300 data SPT Tahunan | 82,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan | 3120 data SPT tahunan | 72.850.000 | |
| | | Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan | 14 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan | 14 kali | | |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun | 1 dokumen | 35,000,000 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun | 1 dokumen | 25.000.000 | |
| Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | BKD Kota Pekalongan | Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | 3 kali | 60,000,000 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | 3 kali | 32.000.000 | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 508,000,000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | 100 Persen | 392.428.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | BKD Kota Pekalongan | Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | 7 laporan | 73,000,000 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD | 68 laporan | 59.000.000 | |
| | | Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD | 68 laporan | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | 7 laporan | | |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | BKD Kota Pekalongan | Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun | 13 laporan | 14,500,000 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun | 13 laporan | 8.000.000 | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | 0 laporan | | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | 0 PD/ unit kerja | | |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun | 7 laporan | 120,000,000 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan | 5 kali | 95.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|--|----------------|----------------------|---|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan | 5 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun | 7 laporan | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun | 2 dokumen | 140,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun | 2 dokumen | 90.000.000 | |
| | | Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 kali | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun | 12 laporan | 14,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun | 12 laporan | 10.000.000 | |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun | 1 dokumen | 27,500,000 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun | 1 dokumen | 20.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|--|----------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | BKD Kota Pekalongan | Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan secara triwulanan | 4 kali | 119,000,000 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan | 4 kali | 110.428.000 | |
| | | Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan triwulanan | 4 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun | 4 laporan | | |
| | | Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir | 4 unit kerja | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan | 12 kali | | |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 5,000,000,000 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos | 100 Persen | 5.000.000.000 | |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | BKD Kota Pekalongan | Jumlah bulan penyediaan dana BTT | 12 bulan | 5,000,000,000 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan dana BTT | 12 bulan | 5.000.000.000 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 1,615,000,000 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | Indikator Program :Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) | 100 Persen | 2.605.558.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|---|----------------|----------------------|---|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 1,615,000,000 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan | 100 Persen | 2.605.558.000 | |
| Penyusunan Standar Harga | BKD Kota Pekalongan | Jumlah buku standar harga yang disusun | 2 buku | 65,000,000 | Penyusunan Standar Harga | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku standar harga yang disusun | 2 buku | 55.000.000 | |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah | 2 buku | 40,000,000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah | 2 buku | 30.000.000 | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah papan nama aset | 55 buah | 375,000,000 | Pengamanan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah papan nama aset | 55 buah | 1.507.100.000 | |
| | | Jumlah patok batas tanah | 600 patok | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah patok batas tanah | 600 patok | | |
| | | Jumlah pengajuan sertifikat | 800 bidang | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengajuan sertifikat | 800 bidang | | |
| Penilaian Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD | 3 jenis | 75,000,000 | Penilaian Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD | 3 jenis | 65.000.000 | |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat | 1 unit | 420,000,000 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat | 1 unit | 325.480.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala | 2 unit | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala | 2 unit | | |
| | | Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat | 3 unit | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat | 3 unit | | |
| | | Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok | 5 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok | 5 kali | | |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan | 65 laporan | 640,000,000 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan | 80 laporan | 622.978.000 | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan | 0 OPD | | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan | 0 unit kerja | | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 1,853,000,000 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | Indikator Program :Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) | 0,05 Persen | 1.713.530.740 | |
| Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | | | | 1,853,000,000 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | | Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD | 100 Persen | 1.713.530.740 | |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun | 2 dokumen | 150,000,000 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan | 1 kali | 131.400.000 | |
| | | Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun | 12 laporan | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun | 2 dokumen | | |
| | | Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan | 6 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun | 12 laporan | | |
| | | Jumlah sosialisasi dan kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan | 1 kali | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan | 6 kali | | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan | 1 kali | | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|---|----------------|----------------------|---|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan senam sehat PBB yang dilaksanakan | 0 kali | | |
| Penagihan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah surat tagihan yang diterbitkan | 3060 surat | 250,000,000 | Penagihan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah surat tagihan yang diterbitkan | 3060 surat | 223.454.000 | |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah | 50 kali | 190,000,000 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah | 8 wajib pajak | 159.500.000 | |
| | | Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah | 8 wajib pajak | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah | 50 kali | | |
| | | | | | | | Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak | 4,6 persen | | |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata | 1500 objek | 40,000,000 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata | 1500 objek | 30.000.000 | |
| | | Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring | 1140 objek | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring | 1140 objek | | |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah sistem informasi baru yang diadakan | 1 aplikasi | 248,000,000 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi baru yang diadakan | 1 aplikasi | 244.718.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---------------------|---|----------------|----------------------|---|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan | 8 aplikasi | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan | 8 aplikasi | | |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | BKD Kota Pekalongan | Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan | 2000 berkas | 180,000,000 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan | 2000 berkas | 176.550.000 | |
| | | Jumlah Buku DHKP PBB yang disusun | 94 buku | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun | 94 buku | | |
| | | Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB | 4 buku | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021 | 4 buku | | |
| | | Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate | 8000 objek | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate | 8000 objek | | |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan | 94000 lembar | 315,000,000 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan | 93000 lembar | 300.000.000 | |
| | | Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat | 19000 lembar | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat | 19000 lembar | | |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota | 1 orang/bulan | 405,000,000 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota | 1 orang/bulan | 383.224.740 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---------------------|---|-----------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani | 18000 WP/WR | | | | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani | 14400 WP/WR | | |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi | 1500 SSPD BPHTB | 75,000,000 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | BKD Kota Pekalongan | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi | 1500 berkas | 64.684.000 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh Prioritas Nasional di atas, terdapat beberapa sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan sasaran kinerja BKD Kota Pekalongan yaitu:

Sasaran ke 2 untuk PN 1 adalah Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB.

Sasaran ke 4 untuk PN 7 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik.

4.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

4.3 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun

selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

4.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
2. Pencapaian SDGs

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Badan Keuangan Daerah dengan pertimbangan dua faktor tersebut diatas antara lain :

| A | Program | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
|-----------|-----------------|--|
| I | Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS |
| 2 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
| 3 | Sub Kegiatan | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD |
| 4 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
| 5 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| 6 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 7 | Sub Kegiatan | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan |
| II | Kegiatan | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
| 2 | Sub Kegiatan | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |

| | | |
|--|--------------|---|
| 3 | Sub Kegiatan | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank |
| 4 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
| 5 | Sub Kegiatan | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |
| 6 | Sub Kegiatan | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| III Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | |
| 1 | Sub Kegiatan | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |
| 2 | Sub Kegiatan | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |
| 3 | Sub Kegiatan | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 4 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
| 5 | Sub Kegiatan | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |
| 6 | Sub Kegiatan | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
| 7 | Sub | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan |

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| | Kegiatan | Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |
| IV | Kegiatan | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah |
| 2 | Sub Kegiatan | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |
| B | Program | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| I | Kegiatan | Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Standar Harga |
| 2 | Sub Kegiatan | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
| 3 | Sub Kegiatan | Pengamanan Barang Milik Daerah |
| 4 | Sub Kegiatan | Penilaian Barang Milik Daerah |
| 5 | Sub Kegiatan | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
| 6 | Sub Kegiatan | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| C | Program | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| I | Kegiatan | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
| 2 | Sub Kegiatan | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 3 | Sub Kegiatan | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 4 | Sub Kegiatan | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| 5 | Sub Kegiatan | Penetapan Wajib Pajak Daerah |
| 6 | Sub Kegiatan | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah |

| | | |
|------------|-----------------|---|
| | Kegiatan | |
| 7 | Sub Kegiatan | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| 8 | Sub Kegiatan | Penagihan Pajak Daerah |
| 9 | Sub Kegiatan | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |
| D | Program | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| I | Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| 3 | Sub Kegiatan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| II | Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 2 | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 3 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| III | Kegiatan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| IV | Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 2 | Sub Kegiatan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3 | Sub Kegiatan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 4 | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| 5 | Sub Kegiatan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 6 | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 7 | Sub Kegiatan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 8 | Sub Kegiatan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 9 | Sub Kegiatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| V | Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 2 | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 3 | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| VI | Kegiatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 2 | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

Secara rekapitulasi Badan Keuangan Daerah mengelola 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan).

Tabel 3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2022 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 05.02 | KEUANGAN | BKD Kota Pekalongan | | 11.007.026.740 | DAU | | | 9.859.171.032 |
| 05.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | 6.687.938.000 | DAU | | | 6.691.572.600 |
| | Indikator Program :Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) | | 8,33 Persen | 6.687.938.000 | | | 8,08 Persen | 6.691.572.600 |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 1.029.216.000 | DAU | | | 1.029.995.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu | | 100 Persen | 1.029.216.000 | | | 100 Persen | 1.029.995.000 |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 35.000.000 | DAU | | | 35.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun | | 1 dokumen | 35.000.000 | | | 1 dokumen | 35.000.000 |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 35.000.000 | DAU | | | 35.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun | 1 dokumen | 35.000.000 | | | 1 dokumen | 35.000.000 | |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | 62.000.000 | DAU | | | 62.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan | | 2 kali | 50.000.000 | | | 2 kali | 50.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun | | 2 dokumen | 12.000.000 | | | 2 dokumen | 12.000.000 |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 727.908.000 | DAU | | | 728.297.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | | 1 kali | 35.000.000 | | | 1 kali | 35.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun | | 4 dokumen | 681.623.000 | | | 4 dokumen | 682.012.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan | | 2 dokumen | 11.285.000 | | | 2 dokumen | 11.285.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 143.308.000 | DAU | | 143.698.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan | | 1 kali | 35.000.000 | | 1 kali | 35.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | | 4 dokumen | 95.086.000 | | 4 dokumen | 95.476.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan | | 2 dokumen | 13.222.000 | | 2 dokumen | 13.222.000 | |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | 26.000.000 | DAU | | 26.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan | | 12 bulan | 5.000.000 | | 12 bulan | 5.000.000 | |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan | | 16 kali | 21.000.000 | | | 16 kali | 21.000.000 |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | 0 | Pindah Sub Keg sesuai Tuksi | | | 0 |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 266.294.000 | DAU | | | 267.740.600 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D | | 100 Persen | 266.294.000 | | | 100 Persen | 267.740.600 |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | 88.444.000 | DAU | | | 89.149.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah | | 12 kali | 35.000.000 | | | 12 kali | 35.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan | | 67 OPD | 50.969.000 | | | 67 OPD | 51.674.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan | | 3 dokumen | 2.475.000 | | | 3 dokumen | 2.475.000 |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | 23.000.000 | DAU | | | 23.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun | | 30 laporan | 23.000.000 | | | 30 laporan | 23.000.000 |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | 25.000.000 | DAU | | | 25.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai | | 2 kali | 25.000.000 | | | 2 kali | 25.000.000 |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | 72.850.000 | DAU | | | 73.591.600 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan | | 3120 data SPT tahunan | 51.950.000 | | | 3120 data SPT tahunan | 52.691.600 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan | | 14 kali | 20.900.000 | | | 14 kali | 20.900.000 |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | 25.000.000 | DAU | | | 25.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun | | 1 dokumen | 25.000.000 | | | 1 dokumen | 25.000.000 |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 32.000.000 | DAU | | | 32.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | | 3 kali | 32.000.000 | | | 3 kali | 32.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 392.428.000 | DAU | | | 393.837.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | | 100 Persen | 392.428.000 | | | 100 Persen | 393.837.000 |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | 59.000.000 | DAU | | | 59.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD | | 68 laporan | 57.000.000 | | | 68 laporan | 57.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | | 7 laporan | 2.000.000 | | | 7 laporan | 2.000.000 |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | 8.000.000 | DAU | | | 8.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun | | 13 laporan | 8.000.000 | | | 13 laporan | 8.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | | 0 laporan | 0 | | | 0 laporan | 0 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan | | 0 PD/ unit kerja | 0 | | | 0 PD/ unit kerja | 0 |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 95.000.000 | DAU | | | 95.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan | | 5 kali | 40.000.000 | | | 5 kali | 40.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun | | 7 laporan | 55.000.000 | | | 7 laporan | 55.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | 90.000.000 | DAU | | 90.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun | | 2 dokumen | 53.000.000 | | 2 dokumen | 53.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | 1 kali | 37.000.000 | | 1 kali | 37.000.000 | |
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | 10.000.000 | DAU | | 10.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun | | 12 laporan | 10.000.000 | | 12 laporan | 10.000.000 | |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | 20.000.000 | DAU | | 20.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun | | 1 dokumen | 20.000.000 | | 1 dokumen | 20.000.000 | |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 110.428.000 | DAU | | 111.837.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan | | 4 kali | 16.160.000 | | 4 kali | 16.160.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun | | 4 laporan | 37.420.000 | | 4 laporan | 37.420.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan | | 12 kali | 56.848.000 | | 12 kali | 58.257.000 | |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 5.000.000.000 | DAU | | 5.000.000.000 | |
| | Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos | | 100 Persen | 5.000.000.000 | | 100 Persen | 5.000.000.000 | |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2022 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 5.000.000.000 | DAU | | | 5.000.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan dana BTT | | 12 bulan | 5.000.000.000 | | | 12 bulan | 5.000.000.000 |
| 05.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | 2.605.558.000 | DAU | | | 1.459.841.000 |
| | Indikator Program :Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) | | 100 Persen | 2.605.558.000 | | | 100 Persen | 1.459.841.000 |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 2.605.558.000 | DAU | | | 1.459.841.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan | | 100 Persen | 2.605.558.000 | | | 100 Persen | 1.459.841.000 |
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | | | 55.000.000 | DAU | | | 55.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku standar harga yang disusun | | 2 buku | 55.000.000 | | | 2 buku | 55.000.000 |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 30.000.000 | DAU | | | 30.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah | | 2 buku | 30.000.000 | | | 2 buku | 30.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 1.507.100.000 | DAU | | | 357.100.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah papan nama aset | | 55 buah | 61.400.000 | | | 55 buah | 61.400.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah patok batas tanah | | 600 patok | 45.700.000 | | | 600 patok | 45.700.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengajuan sertifikat | | 800 bidang | 1.400.000.000 | | | 78 bidang | 250.000.000 |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | 65.000.000 | DAU | | | 65.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD | | 3 jenis | 65.000.000 | | | 3 jenis | 65.000.000 |
| 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 325.480.000 | DAU | | | 327.427.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang/berat | | 1 unit | 146.700.000 | | | 1 unit | 146.700.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala | | 2 unit | 120.300.000 | | | 2 unit | 122.247.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat | | 3 unit | 30.000.000 | | | 3 unit | 30.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok | | 5 kali | 28.480.000 | | | 5 kali | 28.480.000 |
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 622.978.000 | DAU | | | 625.314.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan | | 80 laporan | 622.978.000 | | | 80 laporan | 625.314.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan | | 0 OPD | 0 | | | 0 OPD | 0 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan | | 0 unit kerja | 0 | | | 0 unit kerja | 0 |
| 05.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | 1.713.530.740 | DAU | | | 1.707.757.432 |
| | Indikator Program :Deviiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) | | 0,05 Persen | 1.713.530.740 | | | 0,05 Persen | 1.707.757.432 |
| 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | | | 1.713.530.740 | DAU | | | 1.707.757.432 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD | | 100 Persen | 1.713.530.740 | | | 100 Persen | 1.707.757.432 |
| 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | 131.400.000 | DAU | | | 306.400.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan | | 1 kali | 105.850.000 | | | 1 kali | 105.850.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun | | 2 dokumen | 660.000 | | | 2 dokumen | 660.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun | | 12 laporan | 3.700.000 | | | 12 laporan | 3.700.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan | | 6 kali | 15.240.000 | | | 6 kali | 15.240.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan | | 1 kali | 5.950.000 | | | 3 kali | 5.950.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan senam sehat PBB yang dilaksanakan | | 0 kali | 0 | | | 1 kali | 175.000.000 |
| 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | | | 223.454.000 | DAU | | | 227.681.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah surat tagihan yang diterbitkan | | 3060 surat | 223.454.000 | | | 3060 surat | 227.681.000 |
| 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | 159.500.000 | DAU | | | 159.500.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah | | 8 wajib pajak | 39.660.000 | | | 8 wajib pajak | 39.660.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah | | 50 kali | 119.840.000 | | | 50 kali | 119.840.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak | | 4,6 persen | 1.713.530.740 | | | 4,7 persen | 1.707.757.432 |
| 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | 30.000.000 | DAU | | | 30.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata | | 1500 objek | 15.500.000 | | | 1500 objek | 15.500.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring | | 1140 objek | 14.500.000 | | | 1140 objek | 14.500.000 |
| 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | 244.718.000 | DAU | | | 55.941.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi baru yang diadakan | | 1 aplikasi | 200.000.000 | | | 0 aplikasi | 0 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan | | 8 aplikasi | 44.718.000 | | | 8 aplikasi | 55.941.000 |
| 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | 176.550.000 | DAU | | | 176.550.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan | | 2000 berkas | 19.476.000 | | | 2000 berkas | 19.476.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun | | 94 buku | 3.906.000 | | | 94 buku | 3.906.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021 | | 4 buku | 3.168.000 | | | 4 buku | 3.168.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate | | 8000 objek | 150.000.000 | | | 8000 objek | 150.000.000 |
| 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | 300.000.000 | DAU | | | 300.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan | | 93000 lembar | 271.600.000 | | | 93000 lembar | 271.600.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2022 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat | | 19000 lembar | 28.400.000 | | | 19000 lembar | 28.400.000 |
| 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | 383.224.740 | DAU | | | 386.297.432 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota | | 1 orang/bulan | 31.989.740 | | | 1 orang/bulan | 32.949.432 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani | | 14400 WP/ WR | 351.235.000 | | | 14400 WP/ WR | 353.348.000 |
| 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | 64.684.000 | DAU | | | 65.388.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi | | 1500 berkas | 64.684.000 | | | 1500 berkas | 65.388.000 |
| X.XX | Non Urusan | | | 18.167.373.950 | DAU | | | 16.984.021.548 |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 18.167.373.950 | DAU | | | 16.984.021.548 |
| | Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | | 100 Persen | 12.693.091.950 | | | 100 Persen | 13.319.976.548 |
| X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 18.150.000 | DAU | | | 18.150.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | 100 Persen | 865.050.000 | | | 100 Persen | 865.050.000 |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 4.700.000 | DAU | | | 4.700.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja yang disusun | | 2 dokumen | 4.700.000 | | | 2 dokumen | 4.700.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra yang disusun | | 0 dokumen | 0 | | | 0 dokumen | 0 |
| X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 2.250.000 | DAU | | | 2.250.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun | | 2 dokumen | 2.250.000 | | | 2 dokumen | 2.250.000 |
| X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 11.200.000 | DAU | | | 11.200.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun | | 4 dokumen | 3.200.000 | | | 4 dokumen | 3.200.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun | | 2 dokumen | 3.000.000 | | | 2 dokumen | 3.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2022 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | | 12 bulan | 1.000.000 | | | 12 bulan | 1.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun | | 5 dokumen | 4.000.000 | | | 5 dokumen | 4.000.000 |
| X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 12.674.941.950 | DAU | | | 13.301.826.548 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | | 100 Persen | 384.300.508.500 | | | 100 Persen | 403.107.046.440 |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12.537.691.950 | DAU | | | 13.164.576.548 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | 12 bulan | 12.537.691.950 | | | 12 bulan | 13.164.576.548 |
| X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 135.000.000 | DAU | | | 135.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan | | 12 bulan | 135.000.000 | | | 12 bulan | 135.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 2.250.000 | DAU | | | 2.250.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | | 1 dokumen | 2.250.000 | | | 1 dokumen | 2.250.000 |
| | Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 100 persen | 1.634.122.000 | | | 100 persen | 1.636.236.000 |
| X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 9.500.000 | DAU | | | 9.500.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah | | 100 Persen | 285.000.000 | | | 100 Persen | 285.000.000 |
| X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | 9.500.000 | DAU | | | 9.500.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota | | 2 kali | 9.500.000 | | | 2 kali | 9.500.000 |
| X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 908.000.000 | DAU | | | 908.000.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah | | 100 Persen | 43.288.000.000 | | | 100 Persen | 43.288.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 7.500.000 | DAU | | | 7.500.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 12 bulan | 7.500.000 | | | 12 bulan | 7.500.000 |
| X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 395.000.000 | DAU | | | 395.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | | 12 bulan | 190.000.000 | | | 12 bulan | 190.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | | 15 unit | 205.000.000 | | | 15 unit | 205.000.000 |
| X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 18.000.000 | DAU | | | 18.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | | 12 bulan | 18.000.000 | | | 12 bulan | 18.000.000 |
| X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 110.000.000 | DAU | | | 110.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | | 11 bulan | 110.000.000 | | | 11 bulan | 110.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 50.000.000 | DAU | | | 50.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 12 bulan | 50.000.000 | | | 12 bulan | 50.000.000 |
| X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 2.500.000 | DAU | | | 2.500.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | | 12 bulan | 2.500.000 | | | 12 bulan | 2.500.000 |
| X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 325.000.000 | DAU | | | 325.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah | | 200 orang/ kali | 325.000.000 | | | 200 orang/ kali | 325.000.000 |
| X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 716.622.000 | DAU | | | 718.736.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 Persen | 40.640.232.000 | | | 100 Persen | 40.758.616.000 |
| X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 3.000.000 | DAU | | | 3.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | | 12 bulan | 3.000.000 | | | 12 bulan | 3.000.000 |
| X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 506.400.000 | DAU | | | 506.400.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 506.400.000 | | | 12 bulan | 506.400.000 |
| X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 207.222.000 | DAU | | | 209.336.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor | | 12 bulan | 207.222.000 | | | 12 bulan | 209.336.000 |
| | Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah | | 100 persen | 3.840.160.000 | | | 100 persen | 2.027.809.000 |
| X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 0 | | | | 0 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 0 Persen | 0 | | | 0 Persen | 0 |
| X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.516.000.000 | DAU | | | 1.703.000.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|--|--------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| | Indikator Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 Persen | 10.641.000.000 | | | 100 Persen | 5.515.000.000 |
| X.XX.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2.313.000.000 | DAU | | | 1.000.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan | | 7 unit | 2.313.000.000 | | | 3 unit | 1.000.000.000 |
| X.XX.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.203.000.000 | DAU | | | 703.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan | | 0 unit | 0 | | | 1 unit | 300.000.000 |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan | | 60 unit | 1.203.000.000 | | | 20 unit | 403.000.000 |
| X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 324.160.000 | DAU | | | 324.809.000 |
| | Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 Persen | 17.987.120.000 | | | 100 Persen | 18.024.113.000 |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|---|--------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Lokasi | Th. 2022 | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | Target | Pagu | | | | |
| X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 134.160.000 | DAU | | 134.809.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | | 47 unit | 134.160.000 | | 47 unit | 134.809.000 | |
| X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 150.000.000 | DAU | | 150.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala | | 1 unit | 150.000.000 | | 1 unit | 150.000.000 | |
| X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 40.000.000 | DAU | | 40.000.000 | |
| | Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | | 12 bulan | 40.000.000 | | 12 bulan | 40.000.000 | |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Peraturan Walikota Pekalongan Nomor xxx Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
2. Ratio PAD
3. Nilai SAKIP OPD

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun 2022 direncanakan dalam Renstra BKD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja 2022 |
|---|--------------------------------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> | | | | |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | WTP |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79,07 |
| 3 | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan | Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu | 100 |
| | | | Ratio PAD | 1,95% |
| 4 | | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | 83,50 |

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Badan Keuangan Daerah tahun 2022. Kebutuhan pendanaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana |
|--|--|-----------------------|-------------|
| 05.02 | KEUANGAN | 11.007.026.740 | DAU |
| 05.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 6.687.938.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.029.216.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 35.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 35.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 62.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 727.908.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 143.308.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 26.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 0 | |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 266.294.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 88.444.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 23.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 25.000.000 | DAU |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana |
|--|---|----------------------|-------------|
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 72.850.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 25.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 32.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 392.428.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 59.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 8.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 95.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 90.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 10.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 20.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 110.428.000 | DAU |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.000.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5.000.000.000 | DAU |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana |
|--|---|-----------------------|-------------|
| 05.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2.605.558.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2.605.558.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | 55.000.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 30.000.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 1.507.100.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 65.000.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 325.480.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 622.978.000 | DAU |
| 05.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.713.530.740 | DAU |
| 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 1.713.530.740 | DAU |
| 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 131.400.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | 223.454.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 159.500.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 30.000.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 244.718.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 176.550.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 300.000.000 | DAU |
| 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 383.224.740 | DAU |
| 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 64.684.000 | DAU |
| X.XX | Non Urusan | 18.167.373.950 | DAU |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.167.373.950 | DAU |
| X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.150.000 | DAU |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.700.000 | DAU |
| X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.250.000 | DAU |
| X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.200.000 | DAU |
| X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.674.941.950 | DAU |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana |
|--|--|----------------------|-------------|
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.537.691.950 | DAU |
| X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 135.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.250.000 | DAU |
| X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 9.500.000 | DAU |
| X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 9.500.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 908.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 395.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 110.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000 | DAU |
| X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 325.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 716.622.000 | DAU |
| X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 506.400.000 | DAU |
| X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 207.222.000 | DAU |
| X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | |
| X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.516.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.313.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.203.000.000 | DAU |
| X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 324.160.000 | DAU |
| X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 134.160.000 | DAU |
| X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 150.000.000 | DAU |

| Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana |
|--|---|------------|----------------|
| X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000 | DAU |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022. Penyusunan Renja 2022 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, September 2021

Kepala BKD Kota Pekalongan


Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005